



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENURUNAN STUNTING

Rania Esdy Prawita*, Rendita Dwibarto, Fitri Rizkiah

Fakultas Kesehatan, Universitas Anak Bangsa, Jl. Pinus I No.693, Kacang Pedang, Gerunggang, Pangkal Pinang, Bangka
Belitung 33684, Indonesia

*raniaedsdy@gmail.com

ABSTRAK

Stunting masih menjadi tantangan di berbagai wilayah, meskipun berbagai kebijakan dan program telah diterapkan untuk mengatasinya. Penelitian ini penting dilakukan guna mendukung upaya penurunan stunting dengan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan intervensi gizi dan efektivitas kebijakan yang ada. Tanpa penelitian yang komprehensif, potensi perbaikan kualitas gizi masyarakat sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan strategis untuk merancang intervensi yang lebih efektif dalam menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah terdampak. Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 masih terdapat beberapa desa di wilayah Kecamatan Mendo Barat menjadi lokus stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 4 orang dan pengambilan subjek dengan teknik snowball sampling. Teknik analisa penelitian menggunakan teknik triangulasi yaitu mengecek keabsahan data dari jawaban hasil wawancara dengan responden. Terdapat komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pemberian makanan tambahan, sikap yang mendukung, sumber daya yang menunjang dan adanya standar operasional prosedur penurunan stunting. Implementasi kebijakan Perda tentang penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat sudah berjalan cukup efektif.

Kata kunci: disposisi; komunikasi; struktur birokrasi; stunting; sumber daya

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATORY POLICIES ON STUNTING REDUCTION

ABSTRACT

Stunting is still a challenge in various regions, although various policies and programs have been implemented to overcome it. This research is important to support efforts to reduce stunting by identifying obstacles in the implementation of nutrition interventions and the effectiveness of existing policies. Without comprehensive research, the potential for improving the nutritional quality of the community is difficult to achieve optimally. Therefore, the results of this study are expected to provide a strategic foundation to design more effective interventions in reducing the prevalence of stunting and improving the quality of life of children in affected areas. A preliminary study conducted by researchers shows that from 2019 to 2024 there are still several villages in the West Mendo District area that have become stunting locus. This study aims to analyze communication, disposition, resources and bureaucratic structure towards the implementation of local regulation policies on stunting reduction in West Mendo District, Bangka Regency in 2024. This research is a research in the form of descriptive analysis using a qualitative research method with a total of 4 informants and subject sampling by snowball sampling technique. The research analysis technique uses the triangulation technique, which is to check the validity of the data from the answers of the interview results with the respondents. There is communication, disposition, resources and bureaucratic structure towards the implementation of local

regulatory policies on stunting reduction carried out by the government to the community through socialization activities, provision of additional food, supportive attitudes, supporting resources and the existence of standard operational procedures for stunting reduction. The implementation of the Regional Regulation policy on stunting reduction in West Mendo District has been quite effective.

Keywords: bureaucratic structure; communicatio; disposition; resources; stunting

PENDAHULUAN

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, yang menyebabkan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar usia 0-60 bulan dengan nilai z-score $<-2SD$ (Kemenkes RI, 2019). al ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak (PERPRES 72, 2021). Penanggulangan stunting menjadi salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs), dengan tujuan mengurangi angka stunting sebesar 40% pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya menghilangkan kelaparan dan malnutrisi pada tahun 2030 (UNICEF, 2020). Secara global, pada tahun 2020 diperkirakan 22% atau sekitar 149,2 juta anak balita mengalami stunting, meskipun data ini diperoleh sebelum pandemi COVID-19 yang menghalangi pengumpulan data. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2000 yang mencapai 33,1% (203,6 juta anak). Di Asia, sekitar 21,8% atau 79 juta anak balita mengalami stunting, dengan proporsi tertinggi di Asia Selatan (30,7% atau 54,3 juta anak) dan terendah di Asia Timur (4,9% atau 800.000 anak) (UNICEF, 2020). Di Indonesia, prevalensi stunting pada anak tercatat sebagai yang kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara, dengan angka rata-rata sebesar 31,8% pada tahun 2020, yang mengategorikan negara ini dalam kategori sangat tinggi (very high) (UNICEF, 2020).

Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara dengan permasalahan gizi ganda, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 30,8%, namun hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021 menunjukkan penurunan menjadi 24,4% (5,33 juta anak di bawah usia lima tahun), meskipun angka tersebut masih di atas standar WHO yang menetapkan prevalensi stunting maksimal 20% (Kemenkes RI, 2022). Sebagai upaya percepatan penurunan stunting, pemerintah Indonesia mengeluarkan PERPRES Nomor 72 Tahun 2021, yang menetapkan target nasional penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting dengan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemenuhan asupan gizi, pola asuh, serta akses layanan kesehatan dan sanitas (PERPRES 72, 2021). Selain itu, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting periode 2018-2024, sebagai acuan untuk mengurangi prevalensi stunting, yang diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 (Kemenkes RI, 2018).

Stunting pada balita menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan motorik, serta meningkatkan risiko gangguan metabolisme di masa dewasa, seperti diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung, yang dapat mengurangi produktivitas dan merugikan perekonomian global hingga 2-3% GDP per tahun (Kemenkes RI, 2022). Di Indonesia, prevalensi stunting turun dari 27,7% pada 2019 menjadi 21,6% pada 2022, meskipun masih melebihi target WHO yang menetapkan angka maksimal 20% (Kemenkes RI, 2022). Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, prevalensi stunting pada 2019 adalah 19,9%, menurun menjadi 18,5% pada 2022, namun mengalami lonjakan menjadi 20,6% pada 2023 (Dinkes Kepulauan Bangka Belitung, 2023). Di Kabupaten Bangka, prevalensi stunting menunjukkan penurunan signifikan, dengan

beberapa desa mencapai status zero stunting pada 2023, meskipun terdapat 10 desa dengan status lokus stunting (E-PPGBM, 2023).

Data dari Dinas P2KBP3A Kabupaten Bangka menunjukkan prevalensi tertinggi pada Puskesmas Penagan dan Puskesmas Petaling, dengan 33 anak (3,46%) dan 82 anak (2,46%) yang mengalami stunting pada 2023 (Dinas P2KBP3A, 2023b). Pada bulan Februari 2023, sebanyak 311 balita di Kabupaten Bangka mengalami stunting, dengan sebaran tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Petaling, yaitu 87 balita. Namun, pada Februari 2024, data entry ePPBGM menunjukkan prevalensi stunting di Puskesmas Petaling sebesar 2,03%, dengan 69 balita yang mengalami stunting (Dinas P2KBP3A, 2023b). Sebagai upaya penurunan stunting, Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2019 mengedepankan peningkatan mutu gizi individu, keluarga, dan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perilaku sadar gizi, serta akses dan mutu pelayanan gizi. Aksi konvergensi ketiga dalam percepatan penurunan stunting, yaitu Rembuk Stunting, melibatkan kolaborasi antar OPD, lembaga, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan intervensi pencegahan dan penurunan stunting, guna mewujudkan Kabupaten Bangka bebas stunting.

Berdasarkan data tren balita stunting di Kabupaten Bangka dari Agustus hingga Desember 2023, terdapat 9 desa dengan persentase tertinggi yang menjadi lokus stunting untuk tahun 2024, di mana 7 desa di antaranya berada di Kecamatan Mendo Barat, yaitu Desa Kota Kapur, Labuh Air Pandan, Kemuja, Penagan, Paya Benua, Petaling Banjar, dan Mendo (Dinas P2KBP3A, 2023a). Pada bulan Desember 2023, data dari Puskesmas Petaling menunjukkan prevalensi stunting tertinggi di Desa Mendo sebesar 4%, diikuti oleh Desa Kemuja (2,2%), Desa Labuh Air Pandan (1,9%), dan desa lainnya dengan prevalensi lebih rendah (Puskesmas Petaling, 2023). Studi pendahuluan yang dilakukan pada 30 Mei 2024 dengan wawancara petugas gizi di Puskesmas Petaling mengungkapkan bahwa beberapa desa di Kecamatan Mendo Barat masih menjadi lokus stunting sejak 2019 hingga 2024. Kebijakan penurunan stunting di daerah ini melibatkan kegiatan rembuk stunting di semua desa pada awal 2024, serta pemberian makanan tambahan lokal seperti telur, susu, dan sayur-sayuran kepada balita stunting dan ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka tahun 2024

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Mendo Barat pada bulan Juni-Juli 2024. Variabel yang diteliti adalah kebijakan peraturan daerah mengenai penurunan stunting. Pengambilan sampel menggunakan teknik snowball sampling, dengan informan utama adalah penanggung jawab program stunting di Kecamatan Mendo Barat dan Puskesmas Petaling, serta informan pendukung ibu yang memiliki bayi stunting. Instrumen penelitian berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data mengikuti model Miles & Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik, sementara penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi kompleks agar mudah dipahami.

HASIL

Tabel 1.
Karakteristik Informan

<i>Informan</i>	<i>Umur</i>	<i>Jenis Kelamin</i>	<i>Pendidikan Terakhir</i>	<i>Keterangan</i>
<i>IU 1</i>	44 Tahun	P	S1	Kepala Puskesmas Petaling
<i>IU 2</i>	30 Tahun	L	S1	Sekretaris Tim Percepatan Penurunan stunting Kecamatan Mendo Barat
<i>IT 1</i>	33 Tahun	P	SD	Ibu yang memiliki anak stunting
<i>IT 2</i>	33 Tahun	P	SD	Ibu yang memiliki anak stunting

Hasil Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini terkait dengan variabel tunggal terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil Wawancara Mengenai Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan utama sudah memahami kebijakan penurunan stunting, termasuk dasar hukum seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2019. Mereka menjelaskan bahwa program penurunan stunting telah dilaksanakan sejak 2018, melibatkan kegiatan seperti rembuk stunting, loka karya mini bulanan, dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK). Koordinasi antara puskesmas, kecamatan, desa, dan berbagai dinas terkait dinilai berjalan baik, meskipun terdapat hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak dan keterbatasan umpan balik dari tingkat desa. Informan triangulasi, yaitu ibu dengan anak stunting, mengetahui definisi stunting dan menyebutkan bahwa penyuluhan terkait program ini telah dilakukan oleh kader kesehatan, bidan, dan petugas puskesmas. Namun, beberapa kendala, seperti kurangnya konsentrasi akibat situasi yang ramai, memengaruhi pemahaman mereka terhadap materi penyuluhan. Anak mereka telah mengalami stunting selama 6 hingga 10 bulan terakhir. Triangulasi teknik dan sumber mengonfirmasi bahwa komunikasi terkait implementasi kebijakan penurunan stunting sudah terjalin dengan baik. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mendukung bahwa koordinasi dan sosialisasi kebijakan dilakukan secara aktif oleh pemangku kebijakan, sementara masyarakat mulai memahami pentingnya upaya ini meskipun masih memerlukan penguatan dalam pelaksanaannya.

Hasil Wawancara Mengenai Disposisi terhadap Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak Puskesmas Petaling dan Kecamatan Mendo Barat mendukung implementasi kebijakan penurunan stunting dengan aktif melakukan koordinasi lintas sektor. Sikap ini tercermin melalui keterlibatan rutin dalam kegiatan seperti rapat triwulanan dan lintas program, serta pelibatan dokter spesialis untuk audit kasus stunting. Respon terhadap kebijakan juga dinilai cepat dan tanggap, terutama dalam mengatasi masalah melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial dan Baznas, untuk mendukung kebutuhan anak stunting. Komitmen pelaksana kebijakan juga terlihat melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin serta upaya inovasi, seperti memperkuat koordinasi lintas OPD. Meski demikian, hingga saat ini belum ada penghargaan resmi dari pemerintah daerah bagi pelaksana yang berhasil, meskipun penghargaan internal seperti insentif layanan dan pemilihan pegawai teladan sudah dilakukan oleh pihak Puskesmas.

Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan meliputi kurang tepatnya sasaran program, koordinasi yang belum optimal dengan desa, dan inovasi yang belum maksimal. Pola asuh masyarakat juga menjadi tantangan signifikan, di mana pendekatan terkait pola pikir, pola asih, dan pola asah perlu lebih diperkuat. Dari wawancara dengan informan triangulasi, yaitu ibu-ibu dengan anak stunting, diketahui bahwa mereka menyadari pentingnya penanganan stunting dan berkomitmen melaksanakan arahan petugas kesehatan. Alasan utama komitmen mereka adalah harapan agar anak-anak mereka tumbuh sehat, normal, dan bebas dari stunting. Hasil triangulasi teknik dan sumber mengonfirmasi bahwa sikap pelaksana kebijakan sudah mendukung dan responsif terhadap implementasi kebijakan. Informan utama menunjukkan sikap positif melalui dukungan dan koordinasi lintas sektor, sedangkan informan triangulasi memahami pentingnya penanganan stunting dan berkomitmen menjalankan arahan untuk kesehatan anak-anak mereka.

Hasil Wawancara Terkait Sumber Daya di Puskesmas Petaling.

Sumber Daya Manusia (SDM): Puskesmas Petaling melibatkan semua SDM, termasuk petugas kesehatan hingga driver, dalam kebijakan penurunan stunting. Di tingkat kecamatan, terdapat 18 orang yang terlibat berdasarkan SK TPPS.

Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana di Puskesmas Petaling sudah lengkap dan menunjang program penurunan stunting, seperti alat pelayanan yang terbagi kluster. Di tingkat kecamatan, tidak ada fasilitas khusus; kegiatan lebih banyak didukung oleh desa dan Puskesmas.

Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Pelatihan bagi kader dan petugas dilakukan secara berkala, seperti pelatihan pengukuran dan orientasi tim pendamping keluarga dari BKKBN. Jadwal pelatihan bervariasi, biasanya setiap 3-6 bulan, sedangkan orientasi dilakukan setahun sekali.

Sumber Pendanaan: Puskesmas Petaling memiliki sumber dana dari APBD, BOK, dan BLUD, sementara kecamatan hanya berperan memfasilitasi tanpa anggaran khusus. CSR dari perusahaan, seperti PT. Pokphand, turut membantu, terutama dalam penyediaan telur untuk anak stunting.

Hambatan:

Hambatan utama adalah keterbatasan dana, meskipun semangat kerja tetap tinggi. Di tingkat kecamatan, tantangan terkait komitmen pelaksana dan kesadaran masyarakat untuk datang ke posyandu.

Bantuan dan Dukungan Keluarga: Jenis bantuan dari petugas meliputi PMT (makanan bergizi) dan kelengkapan sarana seperti timbangan dan alat pengukuran. Dukungan keluarga bervariasi; sebagian mendapatkan dukungan dari suami dan keluarga, sementara yang lain hanya bergantung pada dukungan kerabat.

Implementasi kebijakan penurunan stunting di Puskesmas Petaling sudah didukung oleh sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan pelatihan yang memadai, meskipun ada tantangan dalam hal komitmen pelaksana dan pendanaan.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Puskesmas Petaling dan Kecamatan Mendo Barat terkait implementasi kebijakan penurunan stunting, struktur birokrasi yang digunakan mengacu pada Perpres, Perda, surat edaran Bupati Bangka, dan surat keputusan yang diterbitkan. SOP dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah sesuai dengan standar, termasuk di bagian gizi Puskesmas. Informan utama menyatakan bahwa pengambilan keputusan terkait penurunan stunting dilakukan oleh Camat, meskipun koordinasi dilakukan secara berjenjang antara pihak-pihak terkait. Terkait pembagian kewenangan, kedua informan utama menyebutkan tidak ada masalah atau hambatan yang berarti. Pembagian tugas sudah jelas dan

sesuai dengan SK masing-masing, meskipun ada tantangan dalam hal komitmen pelaksana yang mempengaruhi percepatan penurunan stunting. Di tingkat lapangan, pemantauan dilakukan oleh kader posyandu yang memantau konsumsi PMT, bahkan sampai memastikan anak menghabiskan makanan yang diberikan. Kendala utama dalam penanganan stunting, menurut informan triangulasi, adalah kurangnya biaya dan pemahaman yang terbatas dari ibu mengenai cara mengasuh anak yang benar. Meskipun demikian, pengawasan dari kader tetap dilakukan dengan mengantarkan dan memantau konsumsi PMT secara rutin. Secara keseluruhan, struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di wilayah ini sudah berjalan dengan baik. Semua pihak terkait, mulai dari Puskesmas hingga kecamatan, telah menerapkan prosedur yang sesuai, meskipun masih ada kendala dalam hal anggaran dan pemahaman masyarakat.

Komunikasi

Komunikasi terhadap kebijakan peraturan daerah tentang penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat antara pemangku kebijakan dalam hal ini Kecamatan Mendo Barat dan Puskesmas Petaling terhadap masyarakat sudah baik. Informasi mengenai kebijakan penurunan stunting sudah dibahas bersama secara jelas oleh Kecamatan Mendo Barat, Puskesmas Petaling dan instansi-instansi terkait lainnya dalam kegiatan rembuk Stunting dan juga pihak swasta terkait CSR. Begitu pula penyampaian atau sosialisasi yang dilakukan dari pihak Kecamatan Mendo Barat dan Puskesmas Petaling kepada masyarakat melalui desa dalam hal ini melibatkan kader-kader dalam kegiatan posyandu dan PMT. Sedangkan dari pihak masyarakat sendiri juga termasuk ibu yang memiliki anak stunting sudah melakukan upaya komunikasi dengan bertanya terkait program-program dalam upaya penurunan stunting dalam kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh instansi terkait meskipun terdapat hambatan yang masih dapat diatasi bersama. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi jika pengambil keputusan benar-benar mengetahui apa yang mereka lakukan. Komunikasi diperlukan agar pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dapat melakukannya agar lebih konsisten dalam melaksanakan masing-masing kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan (Agustino, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wididiati et al., 2022) di desa Lenek Duren bahwa komunikasi yang dilakukan dalam penanganan masalah stunting yaitu melalui sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat, maupun melalui media cetak, dan elektronik. Sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan mendatangi desa-desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terkait terhadap gizi anak. Namun tidak semua masyarakat mudah untuk diajak dalam menerima informasi. Pemikiran masyarakat Lenek Duren yang masih belum terbuka terkait urgensi masalah stunting ini sehingga mereka masih sulit untuk diajak berdiskusi terkait penanganan masalah stunting. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mendo Barat terkait komunikasi dalam penurunan stunting, peneliti menyimpulkan bahwa seluruh strategi komunikasi ini dijalankan dengan pendekatan empatik dan pemahaman terhadap kebutuhan serta budaya masyarakat. Pemerintah daerah, kader serta masyarakat berperan penting sebagai penyampai pesan, pendengar, serta fasilitator dalam proses sosialisasi pencegahan stunting di Kecamatan Mendo Barat. Dalam melaksanakan kebijakan tentang pencegahan stunting terhadap masyarakat desa sudah adanya aturan dan mekanisme yang jelas dari mulai tingkat kecamatan sampai dengan pelaksanaan di tingkat desa. Hasilnya, kebijakan serta program penurunan

stunting ini telah mencapai tujuan dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat terkait pencegahan stunting. Komitmen dan kolaborasi antara pemerintah daerah, kader, masyarakat dan pihak terkait lainnya merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penyebaran informasi penurunan stunting. Dengan adanya komunikasi yang baik dari berbagai pihak, penurunan kejadian stunting di kecamatan Mendo Barat telah berhasil dengan adanya desa yang sebelumnya menjadi lokasi fokus stunting dan sekarang menjadi desa zero stunting.

Disposisi

Disposisi atau sikap terhadap kebijakan peraturan daerah tentang penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat semua unsur pemerintah baik pihak Kecamatan Mendo Barat dan Puskesmas Petaling serta masyarakat sudah mendukung dan merespon dengan baik terhadap implementasi kebijakan penurunan stunting walaupun masih dibutuhkan inovasi lain sebagai penunjang dalam hal penurunan stunting dan dibutuhkan reward dari pemerintah daerah terkait desa-desa yang sudah menjadi zero stunting. Sikap dari pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor penting kedua dalam pendekatan pelaksanaan kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan terjadi tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan agar tidak terjadi bias dalam praktek (Agustino, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wididiati et al., 2022) di desa Lenek Duren bahwa sikap pelaksana kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur dilihat dari responsif atau kepekaan aktor pelaksana terhadap kebijakan kurang baik. Diketahui bahwa optimalisasi pelaksanaan kebijakan stunting baru dilaksanakan 2020 silam padahal sejak tahun 2018 Kabupaten Lombok Timur telah ditetapkan sebagai salah satu lokus kabupaten penanganan stunting di Indonesia. Lemahnya komitmen perangkat daerah di awal pelaksanaan kebijakan stunting secara tidak langsung menghambat pencapaian tujuan penurunan balita stunting. Namun komitmen perangkat daerah muncul dan menjadi lebih baik ketika adanya penanganan intervensi stunting terintegrasi yang mana koordinasi dengan seluruh OPD yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mendo Barat terkait disposisi dalam penurunan stunting, peneliti menyimpulkan bahwa selama ini pihak terkait sangat mendukung, saling berkoordinasi dan tidak ada kesulitan yang berarti untuk melakukan komitmen dalam melaksanakan kebijakan tentang penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat. Sehingga dalam melaksanakan kebijakan suatu program kegiatan perlu di dukung dengan keinginan dan kesadaran dari pelaksana untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuannya agar dapat saling menunjang dan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam melaksanakan kebijakan suatu program. Selain itu reward untuk para pelaksana agar dapat memberikan semangat dan motivasi dalam melaksanakan kebijakan suatu program terutama untuk desa yang sudah berhasil menuju zero stunting di Kecamatan Mendo Barat.

Sumber Daya

Sumber daya terhadap kebijakan peraturan daerah tentang penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat dalam hal SDM sudah mencukupi meskipun ada beberapa yang belum sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut di Kecamatan Mendo Barat. Selain itu kelengkapan sarana dan prasarana di posyandu maupun puskesmas di Kecamatan Mendo Barat sudah lengkap dan menunjang terhadap upaya penurunan stunting. Lalu terkait sumber dana lain dalam pelaksanaan kegiatan penurunan stunting, pihak kecamatan Mendo Barat juga sudah menjalin kerjasama dengan banyak pihak swasta seperti PT. RBT, PT. Pokphand, Samsung, Sumsel Babel dan Bangka Pos. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta

bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan untuk melaksanakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa unsur seperti staf, informasi, wewenang dan fasilitas (Agustino, 2016).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wididiati et al., 2022) di desa Lenek Duren bahwa kualitas SDM cukup baik tetapi pada implementasinya kurang tanggap dan responsif dalam memahami peranannya. Kurangnya responsif pelaksana kebijakan atau OPD dapat dilihat dari hasil kinerja pada tahun 2018-2019 dimana jumlah balita stunting menurun tetapi tidak signifikan. Kader posyandu di Desa Lenek Duren sebagai tombak penanganan stunting masih kurang baik dalam memahami tugas nya. Hal ini dilihat dari terdapat kegiatan yang terlewatkan dalam kegiatan posyandu yaitu proses mengunjungi balita yang tidak hadir saat posyandu. Kuantitas SDM yang belum tercukupi untuk melaksanakan pelayanan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Jumlah tenaga gizi yang ada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 129 orang masih kurang mencukupi kebutuhan pelayanan bagi 1,33 juta jiwa penduduk dengan luas wilayah 2,67 ribu km². Di setiap puskesmas memiliki 4 tenaga gizi tetapi belum mencukupi akibatnya pelayanan yang didapat kurang optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mendo Barat terkait sumber daya dalam penurunan stunting, bahwa selama ini memang sebagian besar semua pemangku kebijakan dari berbagai sektor di Kecamatan Mendo Barat sudah pro aktif untuk membantu dalam melaksanakan kebijakan tentang penurunan stunting terhadap masyarakat desa di wilayahnya masing-masing walaupun masih ada pemangku kebijakan yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting yang belum berkomitmen penuh dalam melaksanakan tugasnya. Kebijakan terhadap penurunan stunting dari pemerintah desa dengan di bantu oleh kader kesehatan sebagai pelaksana dilapangan, juga sarana prasarana serta fasilitas pendukung lainnya sudah memadai dan lengkap sehingga para kader dapat memaksimalkan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan penurunan stunting dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di desa seperti memaksimalkan Posyandu yang ada di desa. Pemanfaatan dana CSR dari pihak swasta juga sebagai penunjang terkait memaksimalkan kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat. Dengan demikian sumber daya yang mumpuni dapat membantu dan melaksanakan kebijakan suatu program secara optimal dan hal ini perlu di dukung dengan fasilitas dan sarana prasarana yang dapat mendukung kebijakan tersebut sehingga dapat dilaksanakan secara optimal sehingga secara berkesinambungan sumber daya yang ada sekarang sebagai salah satu faktor keberhasilan penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi terhadap kebijakan peraturan daerah tentang penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat menunjukkan sudah dilakukan dengan baik dan jelas. Untuk standar operasional prosedur penurunan stunting juga sudah tertuang dalam peraturan daerah nomor 21 tahun 2019 dan juga terdapat dalam surat keputusan tim percepatan penanganan stunting di kecamatan Mendo Barat. Meskipun sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tersedia, atau pelaksana mengetahui hal apa yang harus dilakukan, dan memiliki keinginan untuk melakukan suatu kebijakan. Ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan karena adanya kelemahan internal struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut berkolaborasi dengan banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan (Agustino, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nurva & Maharani, 2023) untuk pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Brebes dilihat dari struktur birokrasi pada dasarnya sudah terbentuk struktur birokrasi yang cukup baik dengan adanya SKPD yang berwenang dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan stunting. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mendo Barat terkait sumber daya dalam penurunan stunting, bahwa SOP dalam melaksanakan kebijakan penurunan stunting sangat penting agar dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan dan hal itu perlu di pahami oleh semua pemangku kebijakan di Kecamatan Mendo Barat. Jenis SOP yang sudah berjalan dilaksanakan berdasarkan perpres, perda maupun surat keputusan yang masih berlaku. Namun memang masih ada beberapa anggota yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat yang kurang berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya sehingga kurang memaksimalkan kebijakan penurunan stunting. Dengan demikian dalam SOP dan standar kerja yang jelas dapat mempermudah dan dapat meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan, selain itu perlu adanya tanggung jawab moral dari para pelaksana di lapangan agar dapat optimal dalam melaksanakan kebijakan program kegiatan penurunan stunting di kecamatan Mendo Barat. Struktur birokrasi yang sudah berjalan selama ini merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Komunikasi sudah berjalan dengan baik, sosialisasi mengenai kebijakan penurunan stunting sudah dibahas bersama secara jelas oleh Kecamatan Mendo Barat, Puskesmas Petaling dan instansi-instansi terkait lainnya dalam kegiatan rembuk stunting, loka mini karya dan juga pihak swasta terkait CSR stunting di Kecamatan Mendo Barat. Sikap atau disposisi semua unsur pemerintah sudah bersikap mendukung dan merespon dengan baik terhadap implementasi kebijakan penurunan stunting walaupun masih dibutuhkan inovasi lain sebagai penunjang dalam hal penurunan stunting di Kecamatan Mendo Barat. Sumber daya yang ada sudah cukup memadai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana tetapi perlu mendapatkan perhatian lebih lagi dalam hal ini sumber daya manusia yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting agar sepenuhnya dapat berkomitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut di Kecamatan Mendo Barat. Kecamatan Mendo Barat secara garis besar atau secara umum sudah menerapkan peraturan daerah ataupun surat keputusan tim percepatan penurunan stunting yang sudah tertuang dalam peraturan daerah nomor 21 tahun 2019 dan juga terdapat dalam surat keputusan tim percepatan penanganan stunting di kecamatan Mendo Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Dinas P2KBP3A. (2023a). *Evaluasi dan Tindak Lanjut Intervensi Stunting Kabupaten Bangka*.
- Dinas P2KBP3A. (2023b). *Resume Balita Stunting Di Kabupaten Bangka Tahun 2024*.
- Dinkes Kepulauan Bangka Belitung. (2023). *Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- E-PPGBM. (2023). *Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Kabupaten Bangka*.

Kemenkes RI. (2018). Buletin Stunting.

Kemenkes RI. (2019). Permenkes Nomor 29 Tahun 2019.

Kemenkes RI. (2022). Hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022.

Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(02), 74–83.

PERPRES 72. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Puskesmas Petaling. (2023). Laporan Gizi Puskesmas Petaling Desember 2023.

UNICEF. (2020). Malnutrition Prevalence Remains Alarming: Stunting is Declining Too Slowly While Wasting Still Impacts The Lives of Far Too Many Young Children.

Wahab, S., Idrus, I., Muliana, H., & Azzahra, N. (2023). Regulations for Organizing Immunizations in Indonesia. *Soepa Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(1), 9-20.

Wididiati, P., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek). *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 10.